

# **Reformulasi Peraturan Hukum Terhadap Penanganan Pengungsi Di Indonesia Sebagai Penguatan Peran Keimigrasian**

Nama : Ivan Ramos

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Surabaya

Pembimbing : Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati S.H., M.S.

## **ABSTRAK**

Secara prinsip, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka sebagai isu yang telah menjadi perhatian internasional. Kenyataan bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967 tidak berarti bahwa Indonesia tidak menghormati hak asasi manusia. Akan tetapi dampak tidak adanya ratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan ketiadaan ketentuan khusus bagi pengungsi asing menciptakan berbagai masalah bagi pengungsi asing di Indonesia serta kondisi peraturan perundang-undangan Indonesia yang masih kurang optimal juga menyebabkan buruknya koordinasi dan integrasi pelayanan pengungsi asing di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kesimpulan meskipun negara belum meratifikasi konvensi, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengungsi berdasarkan prinsip-prinsip HAM universal serta dibutuhkan upaya Imigrasi dalam mereformulasi peraturan hukum terhadap pengungsi di Indonesia untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penanganan pengungsi secara adil dan manusiawi.

Kata kunci : Pengungsi, Konvensi, Imigrasi, Hak Asasi Manusia

**Reformulation of Legal Regulations for Handling Refugees in Indonesia  
to Strengthen the Role of Immigration**

Name : Ivan Ramos

MASTER OF LEGAL SCIENCE DICIPLINE  
FACULTY OF LAW  
SURABAYA UNIVERSITY

Contributor : Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati S.H., M.S.

**ABSTRACT**

In principle, every country has a responsibility to protect refugees and asylum seekers as an issue that has become an international concern. The fact that Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol does not mean that Indonesia does not respect human rights. However, the impact of the absence of ratification of the 1951 Refugee Convention and the absence of special provisions for foreign refugees has created various problems for foreign refugees in Indonesia and the condition of Indonesian laws and regulations which are still less than optimal has also resulted in poor coordination and integration of foreign refugee services in Indonesia.

This research concludes that even though countries have not ratified the convention, they still have a responsibility to protect refugees based on universal human rights principles and that immigration efforts are needed to reformulate law enforcement against refugees in Indonesia to strengthen Indonesia's image as a country committed to protecting human rights and handling refugees fairly and humanely.

Keywords: Refugees, Convention, Immigration, Human Rights